KEMENTERIAN HUKUM **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau**	**NOMOR SOP**	W4.KU.02.01-1560
	TANGGAL PEMBUATAN	2025-03-21
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	2025-03-21
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH**  **NUR ICHWAN**
	NAMA SOP	**PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tenatng Standar Akuntansi Pemerintah 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 dan perubahannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 10. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Berjalan 11. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi LPJ Bendahara 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan ANggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1. Mengetahui sistem dan prosedur administrasi pemerintahan 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Menegtahui sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 4. Memahami tugas dan fungsi pengelola keuangan 5. Memahami penggunaan aplikasi keuangan pemerintah
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
-	1. Komputer/printer/scanner 2. Jaringan internet 3. Alat telekomunikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

No	Kegiatan	Bendahara	KPA	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mencetak laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, Berita Acara Pemeriksaan Kas, buku kas umum (BKU) dan megupload rekening koran pada aplikasi Sakti			Laporan pertanggungjawaban, Berita AcaraPemeriksaan Kas, buku kas umum, rekening koran	15 menit	Laporan pertanggungjawaban, Berita Acara Pemeriksaan Kas, buku kas umum	-
2	Mengecek, memeriksa dan menandatangani LPJ, BA pemeriksaan kas, BKU dan rekening koran			Laporan pertanggungjawaban, Berita acara pemeriksaan kas, buku kas umum	15 menit	Laporan pertanggungjawaban, berita acara pemeriksaan kas, buku kas umum yang telah ditandatangani	-
3	Mengupload LPJ, BA pemeriksaan kas dan BKU yang telah ditandatangani pada aplikasi Sakti dan mengirimkan ADK LPJ ke KPPN pada aplikasi Sakti, mengarsipkan LPJ,BAP kas, BKU dan dokumen pendukung lainnya			Laporan pertanggungjawaban, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Buku kas Umum yang telah ditandatangani	-	-	-